

## RINGKASAN

Persoalan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan masalah lama yang selalu baru. Sepanjang sejarah, etnis Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai kelompok masyarakat yang bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Puncaknya terjadi sekitar medio Mei 1998 di Jakarta, yang merupakan "buku hitam" sejarah bangsa sehingga dikategorikan sebagai tragedi nasional.

Bila dicermati, sesungguhnya persoalan utamanya bukan karena perbedaan etnis, ras, agama, dsb. Tidak juga karena stereotip antar etnis. Tetapi yang lebih mendasar adalah karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah "Masalah Cina" yang represif dan diskriminatif. Kebijakan yang tidak menempatkan etnis Tionghoa sebagai warga masyarakat dan warga negara secara layak. Etnis Tionghoa tidak diperlakukan secara adil dalam persamaan dan kesamaan sebagai hak setiap warga negara. Kebijakan diskriminatif itu tidak hanya pada bidang politik dan ekonomi saja, tetapi hampir menyentuh pada semua lini kehidupan seperti agama, sosial, bahasa, pendidikan dan kebudayaan.

Seiring dengan angin segar semangat demokratisasi pada era reformasi ini, banyak harapan yang ditumpahkan etnis Tionghoa pada pemerintahan Indonesia Baru. Harapan untuk dicabutnya berbagai kebijakan yang selama ini membelenggu dan menempatkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang marginal dan berbeda.

Oleh karena itu dirasakan perlu adanya suatu penelitian tentang interpretasi makna kebijakan pemerintah "Masalah Cina" oleh Komunitas Etnis Tionghoa di Lithang Boen Bio Surabaya. Penelitian ini diharapkan mampu meretrospeksi dan rekontekstualisasi seluruh "Masalah Cina" untuk memperbaiki interaksi sosial antar etnis dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga bermanfaat untuk dijadikan rumusan nasihat bagi pengambil keputusan pada bidang publik di masa depan.

Penelitian dengan metode diskriptif kualitatif ini dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan etnis Tionghoa Khonghucu pada Makin Boen Bio Surabaya, mulai 15 September 1999 sampai 28 Februari 2000, sebagai komunitas yang paling terkena dampak kebijakan itu.

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Gramsci dan kekerasan politik Ted Robert Gurr sebagai teori utama. Sedangkan teori kombinasi tindakan sosial Weber dengan teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer sebagai landasan pola interpretasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemarginalan etnis Tionghoa terutama disebabkan kebijakan pemerintah "Masalah Cina" yang tidak menempatkan etnis Tionghoa dalam persamaan dan kesamaan sebagai warga masyarakat dan warga negara. Akibatnya, terjadilah hubungan antar etnis yang tidak harmonis dan melahirkan sejumlah "dominasi" yang potensial menimbulkan konflik seperti terjadinya kerusuhan medio Mei 1998 yang lalu. Oleh karena itu kebijakan "Masalah Cina" sudah selayaknya untuk dihapuskan atau dicabut.